



BUPATI JENEPONTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DRS. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si**

Jabatan : **BUPATI JENEPONTO**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jeneponto, 9 Januari 2023



Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABUPATEN JENEPONTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas manusia	Indeks Pembangunan Manusia	65,38
2	Meningkatkan kualitas manusia	Indeks Pembangunan Gender	92,57
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	72,12
4	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	56,53
5	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	67,66
6	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	68,35
7	Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	B
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	BB
9	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan public lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
10	Meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	56,02
11	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	4,9
12	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	85,76
13	Meningkatnya kualitas vegetasi lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77,39
14	Menurunnya tingkat disparitas ekonomi masyarakat	Indeks Gini	0,328
15	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Kawasan Kumuh Yang Tertangani	5,0

16	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani	0,19
17	Meningkatnya kualitas dan jangkauan infrastruktur wilayah	Indeks Jangkauan Infrastruktur Wilayah	65,51
18	Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	4,68-6,23
19	Meningkatnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	12,16
20	Meningkatnya jumlah penduduk yang produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21
21	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita	30.150.000
22	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
23	Meningkatnya kinerja pengelolaan dan kualitas penyajian laporan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
24	Meningkatnya produktivitas pendapatan asli daerah	Persentase PAD Terhadap PDRB	1,04
25	Meningkatkan pemahaman dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama dan budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	80-90
26	Tercegahnya konflik SARA	Tingkat Terjadinya Konflik SARA	Tidak Terjadi
27	Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Persentase Angka Kriminal Yang Tertangani	95
28	Meningkatnya penegakan norma kehidupan dalam masyarakat	Persentase Gangguan K3 Yang Tertangani	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 140.989.407.864	APBD
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 4.583.049.600	APBD
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 510.991.884	APBD
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 0	APBD
5.	Pengelolaan Pendidikan	Rp. 139.457.269.376	
6.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 172.775.000	APBD
7.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 679.519.250	APBD
8.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 259.483.000	APBD
9.	Perlindungan Perempuan	Rp. 11.000.000	APBD
10.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 410.485.000	APBD
11.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.821.285.460	APBD
12.	Pendaftaran Penduduk	Rp. 87.000.000	APBD
13.	Pencatatan Sipil	Rp. 155.0000.000	APBD
14.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 693.045.600	APBD
15.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 527.531.500	APBD
16.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.073.170.860	APBD
17.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 1.320.558.600	APBD
18.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.427.556.000	APBD
19.	Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 271.194.000	APBD
20.	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 100.735.000	APBD
21.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 63.500.000	APBD
22.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 250.500.000	APBD

23.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Rp.	16.300.000	APBD
24.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp.	15.700.000	APBD
25.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	7.850.000	APBD
26.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	7.850.000	APBD
27.	Pengelolaan Persampahan	Rp.	1.369.900.000	APBD
28.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	7.060.004.700	APBD
29.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	5.695.370.800	APBD
30.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	249.887.100	APBD
31.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	507.814.300	APBD
32.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	698.180.000	APBD
33.	Penyelenggaraan Jalan	Rp.	18.680.012.000	APBD
34.	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	76.902.700	APBD
35.	Pengembangan Perumahan	Rp.	507.000.000	APBD
36.	Kawasan Permukiman	Rp.	741.606.750	APBD
37.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	260.000.000	APBD
38.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	570.500.000	APBD
39.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	575.140.000	APBD
40.	Pengelolaan Pelayaran	Rp.	27.500.000	APBD
42.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	7.015.806.000	APBD
43.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	1.217.798.500	APBD
44.	Penyuluhan Pertanian	Rp.	220.475.200	APBD
45.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	2.858.000.000	APBD
46.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	3.002.100.000	APBD
47.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	5.000.000	APBD

48.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	30.000.000	APBD
49.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	0	APBD
50.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	587.594.500	APBD
51.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	29.827.500	APBD
52.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	50.000.000	APBD
53.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	5.700.000	APBD
54.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	65.000.000	APBD
55.	Pengembangan UMKM	Rp.	473.200.000	APBD
56.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	0	APBD
57.	Pemberdayaan Sosial	Rp.	0	APBD
58.	Rehabilitasi Sosial	Rp.	862.818.000	APBD
59.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	512.240.000	APBD
60.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	38.200.000	APBD
61.	Pemasaran Pariwisata	Rp.	88.158.300	APBD
62.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp.	0	APBD
63.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	28.500.000	APBD
64.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	1.720.400.000	APBD
65.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	162.789.793.100	APBD
66.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	281.430.629	APBD
67.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	694.152.000	APBD
68.	Pengembangan Kebudayaan	Rp.	3.068.222.050	APBD
69.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp.	1.572.032.400	APBD
70.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp.	0	APBD
71.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	1.737.556.164	APBD
72.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan	Rp.	354.101.000	APBD

	Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
73.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 3.597.960.000	APBD
74.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 118.911.000	APBD

Jeneponto, 9 Januari 2023

BUPATI JENEPONTO,



Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si